

***ANALYSIS OF WORK PROFESSIONALISM IN THE MANAGEMENT OF
BUMDES IN BONTOMANAI DISTRICT, SELAYAR ISLANDS REGENCY***

**ANALISIS PROFESIONALISME KERJA PADA PENGELOLAAN
DANA BUMDES DI KECAMATAN BONTOMANAI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

ANNE HARDIYANTI

**Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar**

E-mail: annehrdiyanti@gmail.com

SUMMARY

This research aimed to find out how the professionalism of BUMDes managers work in Bontomanai District. The population in this research were all BUMDes managers in Bontomanai District and the sample was taken by the purposive sampling method where the respondents were taken as interested parties and knew about the problem being studied. Data was collected by means of documentation and direct interviews. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique. The results showed that the nine BUMDes in Bontomanai District did not have good competence, effectiveness, efficiency, and work responsibilities, so it can be concluded that the BUMDes managers in Bontomanai District have poor work professionalism.

Keyword : work professionalism.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana profesionalisme kerja pengelola BUMDes pada BUMDes yang ada di Kecamatan Bontomanai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Bontomanai dan sampel penelitian ini diambil dengan metode *Purposive Sampling* dimana responden diambil merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesembilan BUMDes di Kecamatan Bontomanai tidak memiliki kompetensi, efektifitas, efisiensi, dan tanggung jawab kerja yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Bontomanai memiliki profesionalisme kerja yang kurang baik.

Kata kunci: Profesionalisme Kerja.

A. Pendahuluan

SDM merupakan modal dan kekayaan yang terpenting bagi sebuah organisasi. Waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Semua potensi SDM sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya, untuk itu peran SDM yang kompeten sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2010, p. 96) Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab.

Pentingnya profesionalisme aparatur pemerintah sejalan dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Salah satu program pemerintah yang saat ini dijalankan oleh Pemdes adalah pembangunan ekonomi desa yang mandiri melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes.

BUMDes merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Pemdes yang dikelola oleh pihak manajemen

tertentu yang ditunjuk oleh Pemdes. Pengelolaan BUMDes sendiri haruslah dilakukan secara baik dan terarah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mensejahterahkan perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya desa yang ada

Berdasarkan data dari BPM SULSEL bahwa terdapat 69 BUMDes dari 88 desa dan kelurahan yang ada di Selayar yang artinya hampir seluruh desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki BUMDes. Tetapi hanya ada 12 BUMDes yang menghasilkan omzet atau pendapatan, yang berarti hanya 17% saja BUMDes yang telah beroperasi dan menghasilkan pendapatan dari modal yang telah diberikan oleh pemerintah. Sedangkan BUMDes sendiri diharapkan mampu menunjang perekonomian desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

Melihat banyaknya BUMDes di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak menghasilkan omzet dari modal yang dimiliki, utamanya di Kecamatan Bontomanai membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang manajemen BUMDes terkait dengan profesionalisme sumber daya manusia dengan judul “**Analisis Profesionalisme Kerja pada Pengelolaan Dana Bumdes di Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar**”.

B. Tinjauan Pustaka

Menurut Sedarmayanti (2010, p. 96) Profesionalisme adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan

sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab. Menurut Sari (2017, p. 13) Profesionalisme adalah paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik. Menurut Agung (2005) Profesionalisme menyangkut kecocokan (*fitness*), antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*), terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional.

C. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola BUMDes yang ada di Kecamatan Bontomanai dan sampel penelitian ini diambil dengan metode *Purposive Sampling* dimana responden diambil merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara langsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

D. Hasil dan Pembahasan Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan

pengetahuan yang dimiliki. Pengelola BUMDes di Kecamatan Bontomanai yang merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 38 orang dari 51 jumlah pengurus keseluruhan di Kecamatan Bontomanai, sedangkan yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi hanya 7 orang, dan sisanya merupakan lulusan SD dan SMP masing-masing 3 orang. Jika dilihat dari usaha-usaha disetiap BUMDes yang terdiri dari usaha jual beli arang, jual beli hasil kebun, koperasi simpan pinjam, penyewaan tenda dan pertukangan, tidak ada satupun pengelola yang berkompetensi atau memiliki pengetahuan tertentu yang sesuai dengan usaha BUMDes yang dikelolanya. Hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja dari masing-masing pengelola BUMDes yang sangat kurang bahkan dapat dikatakan tidak berpengalaman dalam mengelola setiap usahanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi kerja pengelola BUMDes masih sangat kurang.

Efektivitas

BUMDes dapat dikatakan efektif apabila target kerja yang meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu dapat tercapai. BUMDes di Kecamatan Bontomanai tidak berjalan efektif, hal ini tidak lepas dari kinerja pengelolanya. Dimana pengelola BUMDes juga tidak bekerja secara efektif, sebagian besar BUMDes di Kecamatan Bontomanai belum mencapai targetnya yaitu untuk membantu perekonomian desa. BUMDes yang ada belum memberikan sumbangsihnya bagi perekonomian desa, sehingga

manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kinerja pengelolanya, meskipun begitu BUMDes di desa Bonea Timur mendapatkan pendapatan dari hasil usaha penyewaan tenda dari tahun 2016-2018 meskipun belum maksimal, perinciannya dapat dilihat pada lampiran. Dari beberapa pendapat dan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes belum bekerja secara efektif.

Efisiensi

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah biaya dan sumber daya yang digunakan, semakin sedikit biaya dan sumber daya yang digunakan untuk kegiatan yang sama maka dapat dikatakan semakin efisien. Seluruh BUMDes di Kecamatan Bontomanai telah diberikan bantuan berupa modal yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha BUMDesnya.

Meskipun demikian ada beberapa BUMDes yang tidak menggunakan modal tersebut artinya modal yang ada mengendap dan tidak dimanfaatkan oleh pengelola BUMDesnya, salah satunya yaitu di Desa Bontomarannu. Sehingga modal yang diberikan oleh pemerintah BUMDes tidak berubah hingga akhir periode masa kepengurusan BUMDes. Meskipun begitu ada juga BUMDes yang memanfaatkan modal tersebut seperti di BUMDes Panca usaha dan Bintang Timur. BUMDes ini menjalankan modalnya dengan usaha penyewaan tenda, begitupun dengan BUMDes Panca Usaha.

Pada awal dibentuknya, BUMDes Panca Usaha melakukan usaha jual beli kopra, tetapi karena terjadi kenaikan harga kopra yang mengakibatkan penurunan permintaan kopra sehingga usaha dialihkan ke penyewaan tenda. Hal ini mengakibatkan banyak bahan baku pembuatan kopra yang terbuang sia-sia. Berdasarkan beberapa informasi dan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelola BUMDes kurang efisien dalam mengelola modal yang ada.

Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya tepat pada waktunya dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dibuatnya. Dalam mengelola BUMDes diperlukan tanggung jawab yang besar dalam mengelola modal yang ada, karena pengelola BUMDes belum diberikan upah tetap yang artinya pengelola BUMDes bekerja secara sukarela adapun pendapatannya dari hasil mengelola modal yang diberikan.

Sebagian besar modal BUMDes tidak terkelola dengan maksimal, dikarenakan beberapa faktor. Pengelolaan BUMDes tidak dilakukan seperti jam kerja aparatur desa di instansi desa lainnya, dimana pengelola BUMDes hanya bekerja saat adanya permintaan. Dari seluruh BUMDes yang ada hanya ada dua BUMDes yang dapat memberikan catatan dari kegiatan operasionalnya, dapat dilihat pada lampiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes di Kecamatan Bontomanai kurang bertanggung jawab dalam

mengelola modal dan dalam kegiatan operasional BUMDesnya.

E. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengelola BUMDes di Kecamatan Bontomanai kurang kompeten dalam menjalankan pekerjaannya, dimana tidak satupun pengelola BUMDes yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan usaha BUMDes yang dijalani.
2. Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Bontomanai memiliki efektifitas dan efisiensi kerja yang kurang baik. Hal ini tercermin pada kualitas kerja dan hasil kerja yang tidak sesuai dengan visi dan misi masing-masing BUMDes dalam membantu perekonomian masyarakat desa.
3. Pengelola BUMDes memiliki tanggung jawab kerja yang kurang baik dalam mengelola BUMDes utamanya dalam hal keuangan, dimana aktivitas operasional BUMDes tidak memiliki laporan pertanggung jawaban sesuai kesepakatan pada awal pembentukan tiap-tiap BUMDes.

Saran

1. Bagi pemerintah desa, dapat mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi pengelola yang ditunjuk dalam menjalankan BUMDes, sehingga BUMDes dapat dikelola dengan baik. Selain itu pemerintah desa diharapkan melakukan pengawasan yang ketat dan secara tegas mengganti pengelola yang dinilai tidak berkompeten dalam menjalankan tanggung jawabnya.

2. Bagi pengelola BUMDes, disarankan untuk secara aktif mengikuti pelatihan yang ada baik skala kabupaten maupun provinsi terkait pengelolaan dan pengembangan BUMDes yang ada.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dibidang yang sama hendaknya menambahkan variabel penelitian lain seperti jumlah anggaran dan sistem pengawasan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi profesionalisme kerja BUMDes.

Daftar Pustaka

Agung, K. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta, Pembaruan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Sari, M. (2017). Pengaruh Profesionalisme Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri KC Palembang. Jurusan Perbankan Syariah Palembang, UIN Raden Fatah Palembang: 13.

Sedarmayanti (2010). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung, Mandar Maju: 96.